

RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	(PNBP tahun berjalan- PNBP tahun sebelumnya)/(PNBP tahun sebelumnya) x 100 %	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah, Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	2.937.658.000	1.059.015.000	TW I	TW I	<p>Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Pelantikan PPNS, Koordinasi dengan Diten AHU, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Sosialisasi/ Seminar Kenotariatan, Sosialisasi Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Penyelenggaraan Helpdesk Layanan AHU, Migrasi Data</p>	<p>Terlaksananya kegiatan Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Pelantikan PPNS, Koordinasi dengan Diten AHU, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Sosialisasi/ Seminar Kenotariatan, Sosialisasi Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Penyelenggaraan Helpdesk Layanan AHU, Migrasi Data Layanan AHU, Pameran,</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Pelantikan PPNS, Koordinasi, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Lpaoran Kegiatan Publikasi dan Pameran, Laporan Kegiatan Pelantikan	Sedang Dilaksanakan	
				692.801.000		TW II	TW II	<p>Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Pelantikan PPNS, Sosialisasi Layanan AHU terkait Fidusia, Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Diseminasi terkait Layanan Fidusia, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Produksi Broadcast Talkshow, Advokasi</p>	<p>Terlaksananya kegiatan Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Pelantikan PPNS, Sosialisasi Layanan AHU terkait Fidusia, Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Diseminasi terkait Layanan Fidusia, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Produksi Broadcast Talkshow, Advokasi</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, Pelantikan PPNS, Sosialisasi Layanan AHU terkait Fidusia, Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Diseminasi terkait Layanan Fidusia, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Produksi Broadcast Talkshow, Advokasi	Akan Dilaksanakan		
				922.086.000		TW III	TW III	<p>Dialog Interaktif Radio, Diseminasi terkait Layanan Fidusia, Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Pameran layanan AHU, Sosialisasi Layanan AHU terkait Apostille, Koordinasi dengan Unit Pusat, Advokasi</p>	<p>Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Radio, Diseminasi terkait Layanan Fidusia, Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Pameran layanan AHU, Sosialisasi Layanan AHU terkait Apostille, Koordinasi dengan Unit Pusat, Advokasi</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dialog Interaktif Radio, Diseminasi terkait Layanan Fidusia, Koordinasi Dengan Instansi Terkait, Koordinasi Layanan AHU Lainnya, Pameran layanan AHU, Sosialisasi Layanan AHU terkait Apostille, Koordinasi dengan Unit Pusat, Advokasi	Akan Dilaksanakan		

penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	100% = Rata-rata capaian indikator Pemantauan penyelesaian sengketa HKI di tingkat nasional > 100%?	Pemantauan Produk	214.403.000	86.477.000	TW III	TW III	1. Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang KI dengan Instansi Terkait, 2. Pemantauan /Pengawasan KI	TW III	1. Terlaksananya Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang KI dengan Instansi Terkait, 2. Laporan Pemantauan /Pengawasan KI	1. Laporan Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang KI dengan Instansi Terkait, 2. Laporan Pemantauan /Pengawasan KI	Akan Dilaksanakan	
						29.339.000	TW IV	TW IV	1. Pemantauan/Pengawasan KI, 2. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran KI	TW IV	1. Terlaksananya Pemantauan/Pengawasan KI, 2. Terlaksananya Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran KI	1. Laporan Pemantauan/Pengawasan KI, 2. Laporan Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran KI	Akan Dilaksanakan	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/dukasi tentang KI di Wilayah	70%	Jumlah peserta diseminasi atau pelatihan yang menerima KI di wilayah Jumlah seluruh peserta diseminasi atau pelatihan di wilayah x 100%?	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah, Dieminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.313.861.000	648.600.000	TW I	TW I	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah dan Agenda RuKI	TW I	Terlaksananya kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah dan Agenda RuKI	1. Laporan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah, 2. Laporan Agenda RuKI	Masih Dilaksanakan	
						284.343.000	TW II	TW II	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah dan Kegiatan MIC	TW II	Terlaksananya Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah dan Terlaksananya Kegiatan MIC	1. Laporan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah, 2. Kegiatan MIC	Akan Dilaksanakan	
						361.339.700	TW III	TW III	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah, Kegiatan MIC dan Agenda RuKI	TW III	Terlaksananya Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah, Kegiatan MIC dan Agenda RuKI	1. Laporan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah, 2. Laporan Kegiatan MIC, 3. Laporan Agenda RuKI	Akan Dilaksanakan	
						19.578.300	TW IV	TW IV	Kegiatan Agenda RuKI	TW IV	Terlaksananya Kegiatan Agenda RuKI	Laporan Kegiatan Agenda RuKI	Akan Dilaksanakan	
	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya x 100% Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya?	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	872.955.000	228.530.000	TW I	TW I	Koordinasi dengan Instansi Terkait	TW I	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	Laporan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Masih Dilaksanakan	
						205.425.000	TW II	TW II	Pendampingan Permohonan KI dan Koordinasi dengan Instansi Terkait	TW II	Terlaksananya Pendampingan Permohonan KI dan Koordinasi dengan Instansi Terkait	1. Laporan Pendampingan Permohonan KI, 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait	Akan Dilaksanakan	
						385.000.000	TW III	TW III	Pendampingan Permohonan KI dan Koordinasi dengan Instansi Terkait	TW III	Terlaksananya Pendampingan Permohonan KI dan Koordinasi dengan Instansi Terkait	1. Laporan Pendampingan Permohonan KI, 2. Koordinasi dengan Instansi Terkait	Akan Dilaksanakan	
						54.000.000	TW IV	TW IV	Koordinasi dengan Instansi Terkait	TW IV	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	Laporan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Akan Dilaksanakan	
						75.000.000	TW I	TW I	1) Pembentukan TIM 2) Rapat Koordinasi Stakeholder 3) Koordinasi dan Rapat Pengharmonisasian Raperda 4) Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	TW I	1) SK TIM 2) Rapat Persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Stakeholder 3) Surat Permohonan Pengharmonisasian dari pemerintah daerah 4) Permohonan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah	1) SK TIM telah terbentuk 2) Rapat Stakeholder telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 3) Koordinasi Fasilitasi harmonisasi telah dilaksanakan sebagian ke beberapa Pemerintah Daerah 4) Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi ke daerah dan beberapa Surat permohonan pengharmonisasian telah disampaikan oleh pemerintah daerah ke Kanwil 5) Pelaksanaan Rapat Mediasi dan		

Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah ranperda yang difasilitasi / Jumlah permohonan fasilitasi ranperda x100 %	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	305.979.000	75.000.000	TW II	TW II	1)Koordinasi Kepermerintah daerah dan Rapat Pengharmonisasiaan Raperda 2)Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	TW II		1)Surat Permohonan Pengharmonisasiaan dari pemerintah daerah 2)Permohonan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah	1)Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi ke daerah dan Surat permohonan pengharmonisasiaan telah disampaikan oleh pemerintah daerah ke Kanwil dan pelaksanaan rapat pengharmonisasian raperda 2)Pelaksanaan Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah	
						100.000.000	TW III	TW III	1)Koordinasi Kepermerintah daerah dan Rapat Pengharmonisasiaan Raperda 2)Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	TW III		1)Surat Permohonan Pengharmonisasiaan dari pemerintah daerah 2)Permohonan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah	1)Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi ke daerah dan Surat permohonan pengharmonisasiaan telah disampaikan oleh pemerintah daerah ke Kanwil dan pelaksanaan rapat pengharmonisasian raperda 2)Pelaksanaan Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah	
						55.979.000	TW IV	TW IV	1)Koordinasi kepermerintah daerah dan Rapat Pengharmonisasiaan Raperda 2)Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah 3)pelaporan	TW IV		1)Surat Permohonan Pengharmonisasiaan dari pemerintah daerah 2)Permohonan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah 4) penyusunan laporan	1)Koordinasi Fasilitasi Harmonisasi ke daerah dan Surat permohonan pengharmonisasiaan telah disampaikan oleh pemerintah daerah ke Kanwil dan pelaksanaan rapat pengharmonisasian raperda 2)Pelaksanaan Rapat Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah 3)Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan	
						24.021.000	TW I	TW I	1) Pembentukan TIM 2) Rapat Indeks Reformasi Hukum dan Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 3)Rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	TW I		1) SK TIM 2) Rapat Persiapan Indeks Reformasi Hukum dan Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 3)Rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	1) Rapat Persiapan Indeks Reformasi Hukum dan Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 2)Rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	

Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	100%	rancang yang mendapatkan g	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di 5250.ADG.001 daerah	144.021.000	50.000.000	TW II	TW II	1) Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 2) pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan daerah	TW II		1) Narasumber dari Ditjen PP	1) Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 2) pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan daerah	
						50.000.000	TW III	TW III	1) Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 2) pelaksanaan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan	TW III		1) Narasumber dari Ditjen PP	1) Sosialisasi/Pendampingan daerah pelaksanaan IRH 2) pelaksanaan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan	
						20.000.000	TW IV	TW IV	1) Penyusunan Laporan	TW IV		1) bahan laporan	1) Laporan Tahunan	
Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah		Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai Laporan Pada Aplikasi SAPA HAM	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	140.520.000	51.620.000	51.620.000	TW I	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat terkait Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah dan Rapat Persiapan Aksi HAM Wilayah	TW I	Terlaksananya Persiapan Aksi HAM Wilayah dalam rangka evaluasi pelaksanaan Aksi HAM Periode 2023 dan Persiapan Aksi HAM Tahun 2024	Laporan	Belum Terlaksana	
						43.510.000	-	TW II	Kegiatan Rapat Evaluasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah	TW II	-	Laporan	Belum Terlaksana	
						43.510.000	-	TW III	Kegiatan Rapat Evaluasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah	TW III	-	Laporan	Belum Terlaksana	
						1.880.000	-	TW IV	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Aksi HAM di Wilayah	TW IV	-	Laporan	Belum Terlaksana	

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Kab/Kota peduli HAM	2 instansi Pemerintah	Jumlah Kab/Kota peduli HAM berdasarkan	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	29,140,000	19.620.000	19.620.000	TW I	Kegiatan Persiapan Pengumpulan data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM; Koordinasi Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM; Persiapan Pengumpulan data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah	TW I	Terlaksananya Kegiatan Persiapan Pengumpulan data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM; Koordinasi Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM; Persiapan Pengumpulan data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Wilayah	Laporan	Sudah Terlaksana	
						16.706.000	-	TW II	Kegiatan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	TW II	-	Laporan	Belum Terlaksana	{KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}
						-	-	TW III	-	TW III	-	Laporan	Belum Terlaksana	{KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}
						-	-	TW IV	Pengumuman Keputusan Menteri Hukum dan HAM Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	TW IV	-	Laporan Dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Belum Terlaksana	{KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}
	Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	54,435,000	1.560.000	1.560.000	TW I	Rapat Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW I	Terlaksananya Rapat Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	Laporan	Sudah Terlaksana	
						22.687.500	-	TW II	Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW II	-	Laporan	Belum Terlaksana	
						22.687.500	-	TW III	Terlaksananya Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW III	-	Laporan	Belum Terlaksana	
						7.500.000	-	TW IV	Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW IV	-	Laporan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Penerima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM	Belum Terlaksana	

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	61,960,000	14.180.000	14.180.000	TW I	Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dan apat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM	TW I	Terlaksananya Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dan apat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM	Laporan	Sudah Terlaksana
						23.190.000	-	TW II	Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW II	-	Laporan	Belum Terlaksana
						23.190.000	-	TW III	Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW III	-	Laporan	Belum Terlaksana
						11.620.000	-	TW IV	Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW IV	-	Laporan	Belum Terlaksana
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum	57.005.000	14.251.250	TW I	TW I	Pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum	TW I	Penyiapan perumusan awal rekomendasi analisis dan evaluasi berdasarkan surat BPHN dengan objek dan tema yang telah ditentukan	SK Tim Pelaksana Analisis dan Evaluasi, Undangan, Laporan, Daftar hadir	Sedang berjalan
						14.251.250	TW II	TW II	Pelaksanaan pembahasan lanjutan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum	TW II	Penyiapan perumusan lanjutan rekomendasi analisis dan evaluasi berdasarkan surat BPHN dengan objek dan tema yang telah ditentukan	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-
						14.251.250	TW III	TW III	Pelaksanaan pembahasan lanjutan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum	TW III	Penyiapan perumusan lanjutan rekomendasi analisis dan evaluasi berdasarkan surat BPHN dengan objek dan tema yang telah ditentukan	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-
						14.251.250	TW IV	TW IV	Penyusunan Rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	TW IV	Penyiapan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum	Rekomendasi (laporan) rumusan	-
						21.127.750	TW I	TW I	Pelaksanaan konsolidasi kepada pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi NA dan Propempera	TW I	Penyiapan rumusan rekomendasi awal pelaksanaan kebutuhan ranperda sekaligus inventarisasi serta monev propempera tahun berjalan	SK Tim Pelaksana pelaksanaan kebutuhan NA dan propempera, Undangan, Laporan, Daftar hadir	Sedang berjalan

	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah	84.511.000	21.127.750	TW II	TW II	Pelaksanaan konsolidasi lanjutan kepada pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi NA dan Propemperda	TW II	Penyiapan rumusan rekomendasi lanjutan pelaksanaan kebutuhan ranperda sekaligus inventarisasi serta monev propemperda tahun berjalan	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-	
						21.127.750	TW III	TW III	Pelaksanaan konsolidasi lanjutan kepada pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi NA dan Propemperda	TW III	Penyiapan rumusan rekomendasi lanjutan pelaksanaan kebutuhan ranperda sekaligus inventarisasi serta monev propemperda tahun berjalan	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-	
						21.127.750	TW IV	TW IV	Pelaporan hasil konsolidasi dalam fasilitasi penyusunan NA dan Propemperda	TW IV	Penyiapan rumusan rekomendasi akhir pelaksanaan kebutuhan NA dan propemperda tahun 2025	Laporan rumusan rekomendasi kebutuhan NA dan propemperda tahun 2025	-	
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIH di Wilayah	Persentase anggota JDIH yang dikelola terhadap total anggota JDIH di Wilayah	25%	$= \frac{A}{B} \times 100 \%$ A= Jumlah Anggota JDIH Aktif B = Jumlah Anggota JDIH	Pengelolaan anggota JDIH di Wilayah	99.997.000	24.999.250	TW I	TW I	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah dan peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan hukum	TW I	Terselenggaranya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah dan pelaksanaan konsolidasi	SK Tim Pelaksana, Undangan, Laporan, Daftar Hadir	Sedang berjalan	
						24.999.250	TW II	TW II	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah melalui konsolidasi pada stakeholder terkait dan peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan hukum	TW II	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah dan pelaksanaan konsolidasi integrasi JDIH	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-	
						24.999.250	TW III	TW III	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah melalui konsolidasi pada stakeholder terkait dan peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan hukum	TW III	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah dan pelaksanaan konsolidasi integrasi JDIH	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-	
						24.999.250	TW IV	TW IV	Pengintegrasian anggota JDIH dan pengembangan perpustakaan	TW IV	Aktifasi anggota JDIH dan terintegrasikannya perpustakaan hukum perguruan tinggi sebagai anggota JDIH serta terselenggaranya peningkatan perpustakaan hukum dan SDM	Laporan pelaksanaan kegiatan	-	

Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	$= \frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A= Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum B = Seluruh permohonan bantuan hukum litigasi</p>	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa serta upaya hukum luar biasa	2.944.000.000	736.000.000	TW I	TW I	Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW I	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	Sedang berjalan
						736.000.000	TW II	TW II	Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW II	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	-
						736.000.000	TW III	TW III	Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW III	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	-
						736.000.000	TW IV	TW IV	Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW IV	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	-
	Persentase layanan bantuan hukum Non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	80%	$= \frac{A}{B} \times 100 \%$ <p>A= Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum Non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum B = Seluruh permohonan bantuan hukum Non litigasi</p>	Penyebarluasan informasi dan penanganan perkara di luar pengadilan dan konseling	533.500.000	133.375.000	TW I	TW I	Pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW I	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	Sedang berjalan
						133.375.000	TW II	TW II	Pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW II	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	-
						133.375.000	TW III	TW III	Pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW III	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	-
						133.375.000	TW IV	TW IV	Pelaksanaan layanan bantuan hukum non litigasi oleh OBH kepada masyarakat	TW IV	Terselenggaranya pemberian layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat oleh OBH	BAST	-
				Pelaksanaan pembinaan Bantuan Hukum tingkat daerah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum oleh 37 OBH	53.921.000	13.480.250	TW I	TW I	Pelaksanaan pembinaan Bantuan Hukum tingkat daerah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum oleh 37 OBH	TW I	Terselenggaranya penandatanganan kontrak perjanjian kerja 37 OBH, penandatanganan addendum kontrak	Kontrak Perjanjian Kerja, Adendum Kontrak	Akan dilaksanakan
						13.480.250	TW II	TW II	Pelaksanaan pembinaan Bantuan Hukum tingkat daerah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum oleh 37 OBH	TW II	Terselenggaranya penandatanganan kontrak perjanjian kerja 37 OBH, penandatanganan addendum kontrak	Kontrak Perjanjian Kerja, Adendum Kontrak	
						13.480.250	TW III	TW III	Pelaksanaan pembinaan Bantuan Hukum tingkat daerah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum oleh 37 OBH	TW III	Terselenggaranya penandatanganan kontrak perjanjian kerja 37 OBH, penandatanganan addendum kontrak	Kontrak Perjanjian Kerja, Adendum Kontrak	

						13.480.250	TW IV	TW IV	Pelaksanaan pembinaan Bantuan Hukum tingkat daerah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum oleh 37 OBH	TW IV	Terlaksananya penandatanganan kontrak perjanjian kerja 37 OBH, penandatanganan addendum kontrak	Kontrak Perjanjian Kerja, Adendum Kontrak	
			Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap OBH baru dan pelaksanaan verifikasi dan reakreditasi kepada 37 OBH Periode 2022-2024	89.019.000		22.254.750	TW I	TW I	Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap OBH baru dan pelaksanaan verifikasi dan reakreditasi kepada 37 OBH Periode 2022-2024	TW I	Terlaksananya verasi dan reakreditasi sebagai bahan pertimbangan dan penilaian Panitia Pusat	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan	Akan dilaksanakan
						22.254.750	TW II	TW II	Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap OBH baru dan pelaksanaan verifikasi dan reakreditasi kepada 37 OBH Periode 2022-2024	TW II	Terlaksananya verasi dan reakreditasi sebagai bahan pertimbangan dan penilaian Panitia Pusat	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan	
						22.254.750	TW III	TW III	Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap OBH baru dan pelaksanaan verifikasi dan reakreditasi kepada 37 OBH Periode 2022-2024	TW III	Terlaksananya verasi dan reakreditasi sebagai bahan pertimbangan dan penilaian Panitia Pusat	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan	
						22.254.750	TW IV	TW IV	Pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap OBH baru dan pelaksanaan verifikasi dan reakreditasi kepada 37 OBH Periode 2022-2024	TW IV	Terlaksananya verasi dan reakreditasi sebagai bahan pertimbangan dan penilaian Panitia Pusat	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan	
							38.000.000	TW I	TW I	Pelaksanaan penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat dan pembinaan dan pengembangan KADARKUM Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah	TW I	Terselenggaranya penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat berbentuk Ceramah Penyuluhan Hukum, Pembentukan Kadarkum, Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	SK Tim Pelaksana, Undangan, Laporan, Daftar Hadir

Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	Layanan penyuluhan hukum di daerah dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum	152.000.000	38.000.000	TW II	TW II	Pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KADARKUM Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah	TW II	Terselenggaranya penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat berbentuk Ceramah Penyuluhan Hukum, Pembentukan Kadarkum, Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-			
					38.000.000	TW III	TW III	Pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung kepada masyarakat dan pembinaan dan pengembangan KADARKUM Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah	TW III	Terselenggaranya penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat berbentuk Ceramah Penyuluhan Hukum, Pembentukan Kadarkum, Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	-			
					38.000.000	TW IV	TW IV	Pelaksanaan pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum	TW IV	Terselenggaranya pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum	Laporan pelaksanaan kegiatan	-			
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah satker/instansi	Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	65.340.000	19.177.000	TW I	TW I	Pengumpulan Data	TW I		-	belum terlaksana	Petunjuk Pelaksanaan belum keluar	
						13.500.000	TW II	TW II	Pengumpulan Data	TW II					
						19.163.000	TW III	TW III	Pengumpulan Data	TW III					
						13.500.000	TW IV	TW IV	Pengumpulan Data	TW IV					
			Berita yang masuk dalam Aplikasi SIPKUMHAM	Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	134.150.000	45.200.000	38.141.000	TW I	TW I	Pengumpulan Data	TW I	28,43%	Laporan, Foto Dokumentasi	terlaksana	
						37.100.000	TW II	TW II	Pengumpulan Data	TW II					
						18.950.000	TW III	TW III	Pengumpulan Data	TW III					
						13.500.000	TW IV	TW IV	Pengumpulan Data	TW IV					
			Jumlah Responden	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM	65.790.000	25.680.000	31.364.000	TW I	TW I	Monitoring dan Evaluasi	TW I	23,14%	Laporan, Foto Dokumentasi, Hasil Survey	terlaksana	
						12.180.000	TW II	TW II	Monitoring dan Evaluasi	TW II					
						16.500.000	TW III	TW III	Monitoring dan Evaluasi	TW III					
						11.430.000	TW IV	TW IV	Monitoring dan Evaluasi	TW IV					
			Pemda yang menyampaikan Data Dukung Sesuai Variable Penilaian	Pendampingan Penilaian Mandiri IRH di Wilayah	69.770.000	38.230.000	16.154.000	TW I	TW I	Penyuluhan dan Pendampingan	TW I	23,15%	Laporan dan Foto Dokumentasi	terlaksana	
17.440.000	TW II	TW II				Penyuluhan dan Pendampingan	TW II								
14.100.000	TW III	TW III				Penyuluhan dan Pendampingan	TW III								
-	TW IV	TW IV				Penyuluhan dan Pendampingan	TW IV								
1 Kegiatan	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	29.590.000	750.000	-	TW I	TW I	Penyuluhan dan Pendampingan	TW I			belum terlaksana				
			28.840.000	-	TW II	TW II	Penyuluhan dan Pendampingan	TW II							
			-	TW III	TW III	Penyuluhan dan Pendampingan	TW III								
			-	TW IV	TW IV	Penyuluhan dan Pendampingan	TW IV								